

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, utamanya dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) serta dibantu oleh kecamatan dalam rangka pelaksanaan fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mendukung pencapaian misi 4 yaitu Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata.

a. Alokasi Pendanaan

Untuk mendukung urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 melalui APBD telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6.687.036.500,00. Alokasi anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2020 dapat terealisasi sebesar Rp 5.412.776.185,00 atau 80,94%. Capaian program pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel berikut rencana secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel III.B.8. 1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	6.687.036.500	5.412.776.185	80,94
1	Program Keluarga Berencana	6.295.292.000	5.106.801.685	81,09
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	94.180.000	93.540.000	99,32
3	Program Pelayanan Kontrasepsi	91.564.500	77.264.500	84,38
4	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	30.000.000	25.500.000	85,00
5	Program Pemberdayaan Keluarga	80.000.000	79.400.000	99,25
6	Program Pengendalian Penduduk	90.000.000	24.270.000	26,97

III.B.8. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
7	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	6.000.000	6.000.000	100,00

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo, 2020 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana diimplementasikan untuk mendukung capaian indikator CPR/*Contraceptive Prevalency Rate* (Prevalensi Peserta KB aktif), Rasio petugas KB per desa dan *Age Spesific Fertility Rate* (ASFR) 15-19.

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB DAK Fisik Reguler menjadi sangat penting karena merupakan sarana penunjang para penyuluh KB dan Kader Bina Keluarga dalam memberikan pelayanan KB kepada masyarakat Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2020 kegiatan tersebut dialokasikan untuk pengadaan media KIE berupa 50 BKB Kit, 18 BKL Kit, 21 Genre Kit, 145 Sarana Kerja Sub PPKBD dan 1 Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB.

Dukungan pencegahan dan penurunan Stunting di 10 Desa Stunting dilaksanakan melalui Pengadaan BKB Kit Stunting DAK Fisik Penugasan sebanyak 10 BKB Kit Stunting.

Untuk meningkatkan cakupan kesertaan KB Aktif dan KB Aktif MKJP bagi keluarga miskin tahun 2020 dilaksanakan kegiatan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin sebanyak 650 Peserta KB MKJP (Implant dan IUD) di 15 kecamatan.

Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu dilaksanakan melalui pemberian kompensasi bagi akseptor KB MKJP yang mengalami kegagalan penggunaan kontrasepsi MKJP terutama pada pelayanan KB pasca salin dan pelayanan KB masal kepada 10 akseptor yang mengalami kegagalan dan komplikasi pemakaian kontrasepsi jangka panjang.

Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik) dialokasikan untuk penyediaan sarana serta alat kontrasepsi yang cukup di semua Faskes KB dan mengadakan penyuluhan di 15 Balai Penyuluh, 24 Faskes KB, dan 265 Desa/Kelurahan.

Kegiatan Aneka Berita KB dialokasikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang program dan kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan pemberitaan program KKB PK PP PA melalui iklan layanan masyarakat di 2 stasiun radio dan melalui media cetak adalah penyampaian berita program KKBPK PP dan PA.

Penguatan manajemen data program KB dimaksudkan untuk Pemutakhiran data secara berkala untuk menunjang ketersediaan data kependudukan secara rinci sebagai tolak ukur kinerja telah dilaksanakan.

Wujud kegiatan ini Sosialisasi SIPK Di 15 Kecamatan Di Kabupaten Wonosobo dan Pendataan SIPK di 37 Kampung KB di Kabupaten Wonosobo.

Keluaran dari kegiatan Pengelolaan Data Program KKBPK (Updating Data Keluarga) yaitu tersedianya data hasil pelaksanaan hasil program KKBPK dan buku umpak balik program KKBPK sebanyak 12 buku

2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program ini dialokasikan untuk mendukung capaian indikator RPJMD yaitu rata-rata usia kawin pertama perempuan, rata-rata usia melahirkan pertama perempuan dan % Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun.

Tujuan dilaksanakan program ini yaitu untuk penyampaian informasi dan peningkatan pengetahuan bagi para remaja. Program Kesehatan Reproduksi Remaja dilaksanakan karena isu Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan isu yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya para remaja agar memiliki informasi yang benar mengenai sistem reproduksi serta berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dilaksanakan untuk pemahaman remaja tentang Genre dan dapat mengaplikasikan dalam bentuk kegiatan yang kreatif dan menarik. Wujud dari kegiatan ini yaitu Pemilihan Duta GenRe dan Kelompok PIK R/M unggulan sebanyak 50 orang Remaja Wonosobo yg tergabung pada kelompok PIK R/M.

Keluaran dari kegiatan Operasional Saka Kencana meliputi sosialisasi dan penjangkaran pengukuhan/pendadaran anggota baru dan pembinaan rutin oleh Anggota Saka Kencana, Kwarcab, Pamong Saka, Instruktur dan semua bidang di DPPKBPPPA.

Pembinaan/ Pelatihan PS dan KS dilaksanakan untuk Meningkatkan Pengetahuan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya tentang Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja dan meningkatkan rata-rata usia nikah dan melahirkan pertama bagi perempuan melalui Orientasi /Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya Pengurus PIK R/M se-Kabupaten Wonosobo sebanyak 200 orang.

3) Program Pelayanan Kontrasepsi

Program pelayanan kontrasepsi dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator unmetneed, cakupan kepersertaan KB pada PUS keluarga pra sejahtera, persentase Peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), drop out KB dan % kepersertaan KB Pria.

Pelayanan Konseling KB dialokasikan untuk membantu akseptor dalam menentukan pilihan kontrasepsi yang sesuai dan cocok dengan kondisi klien, sehingga mendapatkan pelayanan KB yang bermutu dan paripurna melalui Rapat koordinasi yang dihadiri oleh unsur DPPKBPPPA, TP PKK Kecamatan, PKB Balai Penyuluh Kecamatan dan PC Muslimat Wonosobo, seta Puskesmas Wonosobo menentukan prioritas sasaran kegiatan, menyepakati jadwal pelaksanaan, menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan melaksanakan pelayanan konseling kb dan pemasangan kontrasepsi IUD dan Implant untuk 241 akseptor.

Guna memenuhi permintaan kebutuhan masyarakat pelayanan KB MOW dan MOP, yang berdampak pada keberlangsungan ber KB dan menurunkan angka kelahiran serta menurunkan AKI dan AKB) pada tahun 2020 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi kegiatan, KIE pada Kader dan masyarakat, PKB bersama Kader melakukan kunjungan pemantapan pada calon akseptor, menentukan jadwal pelayanan, koordinasi dengan Tim PKBRS, menghadirkan calon akseptor dan tindakan pelayanan KB MOW/MOP oleh PPKBD, Sub PPKBD, Penyuluh KB, Tim KB Medis Operasi RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo bagi 51 orang akseptor.

4) Program Pengendalian Penduduk

Tujuan program ini yaitu untuk menyediakan data tentang keluarga sejahtera dan pra sejahtera melalui kegiatan penguatan kampung KB sebanyak 15 pokja Kampung KB di 15 Kecamatan. Kegiatan penguatan kampung KB dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan antusiasme terhadap isu kependudukan, sehingga pemahaman terkait kependudukan tertanam sejak dini.

5) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dilaksanakan untuk mendukung capaian jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB). Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan tenaga pendamping BKB sebanyak 15 kader BKB. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kader BKB, BKR dan BKL di Desa serta dukungan komitmen tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa. Secara keseluruhan kegiatan pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga meliputi pelatihan kader BKB, BKR dan BKL termasuk di desa binaan PKK dan desa wilayah stunting serta workshop peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mendukung program bina keluarga.

6) Program Pemberdayaan Keluarga

Program ini dirancang untuk mendukung capaian indikator RPJMD yaitu Persentase anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB. Tujuan program pemberdayaan keluarga yaitu untuk meningkatkan ketahanan keluarga yang mandiri dan sejahtera.

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan pengetahuan PPKBD pada tahun 2020 dialokasikan anggaran pada kegiatan operasional PPKBD untuk meningkatkan fungsi bantu peran Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Peran Institusi Masyarakat Pedesaan dalam program KKBPK serta terpantaunya kegiatan pertemuan PPKBD di tingkat Kecamatan.

Kegiatan Magang Kader UPPKS dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan anggota UPPKS dalam usaha ekonomi produktif melalui pelatihan pembuatan kue kering sebanyak 30 peserta dan monitoring evaluasi di 15 kecamatan.

Sedangkan kegiatan pelatihan tenaga pendamping Bina Keluarga Balita (BKB) untuk meningkatkan keterampilan kader BKB dilaksanakan melalui pelatihan kader Bina keluarga balita (BKB) sebanyak 15 kader dengan lokus kegiatan di desa stunting.

c. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berdasarkan pada RKPD tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.B.8. 2
Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Berdasarkan RKPD 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Target 2020	Realisasi Capaian 2020	% Realisasi Capaian 2020	Status Capaian	Target (RPJMD) 2021
1	CPR/Contraceptive Prevalancy Rate (Prevalensi Peserta KB aktif)	%	78,51%	84,3	78,76	93,43%	ST	85,20
2	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	%	100,00%	100%	100%	100,00%	ST	100%
3	Rasio petugas KB /desa		4,14	2,22	4,41	50,34%	SR	2
4	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19		68,67	55	63,65	86,41%	T	45
5	Unmetneed		10,62	7,64	10,42	73,32%	S	7,57
6	Cakupan kepersertaan KB pada PUS keluarga pra sejahtera		77,55	69	77,39	112,16%	ST	75
7	Persentase Peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	%	37,86%	44,5	38,01	85,42%	T	45%
8	Drop out KB	%	10,49%	11,63	9,99	116,42%	ST	10%
9	% Kebersertaan KB Pria	%	2,41%	3,70%	2,51%	67,84%	S	4%
10	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)		359	456	331	72,59%	S	457
11	% anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	84,03%	87,38	84,12	81,71%	T	87,39
12	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang terbentuk dan terbina		247	231	166	71,86%	S	235
13	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansis (BKL) yang terbentuk		257	35	174	497,14%	ST	40

III.B.8. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Target 2020	Realisasi Capaian 2020	% Realisasi Capaian 2020	Status Capaian	Target (RPJMD) 2021
	dan terbina							
14	Rata-rata usia kawin pertama perempuan	tahun	17 tahun	17,8 tahun	17,9	100,56%	ST	18 tahun
15	Rata-rata usia melahirkan pertama perempuan	tahun	19 tahun	20	19	95,00%	ST	20 tahun
16	% Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun%	%	1,10%	2,25	1,46	154,11%	ST	2%

Sumber: BKKBPPPA Kabupaten Wonosobo, 2020

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Terdapat 16 indikator Kinerja Program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 8 indikator,
- Realisasi Kinerja Program Kategori Tinggi sebanyak 3 Indikator.
- Realisasi Kinerja Sasaran dan Program Kategori Sedang, Rendah dan Sangat Rendah sebanyak 5 Indikator.

Secara umum capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2020 mengalami kenaikan bahkan ada yang sudah mencapai target RPJMD 2021 yaitu cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun. Cakupan kepesertaan KB pada PUS keluarga pra sejahtera, Drop Out KB, Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang terbentuk dan terbina dan Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun.

III.B.8. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

CPR/*Contraceptive Prevalency Rate* atau Prevalensi kepesertaan KB aktif mengalami peningkatan pada tahun 2020. Prevalensi peserta KB aktif pada tahun 2019 sebesar 78,51% dan mengalami kenaikan sebesar 0,25% pada tahun 2020 sebesar 78,76%. Sedangkan Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 63,65 dari 68,67 pada tahun 2019.

Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB yang belum terlayani (*unmetneed*) di Kabupaten Wonosobo masih cukup tinggi yaitu 10,42%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 dengan capaian sebesar 10,62%. Cakupan kepesertaan KB pada PUS keluarga pra sejahtera mengalami penurunan sebesar 0,16% dari tahun 2019 yang berada pada angka 77,55% menjadi 77,39% di tahun 2020. Capaian ini melebihi angka yang ditargetkan dalam RPJMD 2016-2021 pada tahun 2020 yaitu sebesar 69%. Angka drop out KB pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2019 sebesar 10,49% menjadi 9,99%. Di sisi lain, kepesertaan KB pria masih sangat rendah yaitu 2,51%. Capaian tersebut meskipun telah mengalami peningkatan dari tahun 2019 tetapi masih perlu mendapat perhatian karena masih sangat rendah. Demikian juga dengan Rasio petugas KB /desa sebesar 4,41 di tahun 2020 juga perlu menjadi perhatian yang artinya beban kerja setiap Petugas KB harus mengampu 4 sampai 6 Desa binaan target ideal petugas KB mengampu 2 sampai 3 Desa.

Hal ini disebabkan karena peralihan pola pikir PUS muda dari kepesertaan ber-KB modern ke kepesertaan KB tradisional. Data terkait dengan metode kontrasepsi bagi peserta KB tersaji pada tabel berikut:

Tabel III.B.8. 3

Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2018-2020

No.	Metode Kontrasepsi	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	IUD	9,62	9,81	10,61
2	MOW	5,42	1,68	5,26
3	MOP	0,84	0,31	0,79
4	Kondom	1,50	1,84	1,73
5	Implant	20,38	29,64	21,35
6	Suntik	55,24	52,47	53,03
7	Pil	6,99	4,26	7,23

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo, 2020

Penghitungan nilai capaian dari data hasil penyesuaian updating data keluarga di akhir 2020 tersebut tetap menjadi acuan untuk evaluasi dan perencanaan kinerja DPPKBPPPA selanjutnya.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD

Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019, hasil pembahasan DPRD Kabupaten Wonosobo tidak memberikan rekomendasi/ catatan khusus yang perlu ditindaklanjuti. Namun demikian, beberapa permasalahan yang tertuang dalam matriks permasalahan dan solusi belum sepenuhnya bisa diselesaikan dan masih memerlukan penyelesaian pada masa mendatang.

e. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2020 dan solusi pemecahan terhadap permasalahan yang ada dapat dilakukan antara lain :

Tabel III.B.8. 4
Matriks Permasalahan dan Solusi

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengetahuan dan pemahaman PUS tentang pilihan kontrasepsi efektif terpilih masih rendah	a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata dan terintegrasi b. Membangun kemitraan. Jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global
2.	Masih rendahnya kesertaan KB pria (2,5%)	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB pria yang merata dan terintegrasi dalam sistem JKN-BPJS Kesehatan
3.	Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tetapi tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i>) (10,42)	Meningkatkan promosi dan KIE KB diseluruh wilayah dan kelompok kegiatan
4.	Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak program di tingkat desa/rw maupun RT untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program KKBPK	Melaksanakan kerjasama lintas sektoral dan melibatkan petugas lapangan dari masing-masing lintas sektoral yang ada di wilayah (misal PKS, PKH)
5.	Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih rendah, ini ditandai dengan Usia Kawin pertama perempuan masih tinggi,	Peningkatan jumlah, kualitas dan peran PIK KKR di setiap kecamatan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dalam upaya untuk meningkatkan usia kawin pertama perempuan. Serta perlunya peningkatan kerjasama lintas sektoral